DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Toko Gunung Agung.

AR, Putri. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana).* Jakarta: Sofmedia.

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo.

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hariyani, Dwi. 2011. *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum),* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Johan, Bader. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Mondar mandir.

Kusumaatmaja, Mochtar, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu hukum.* Bandung: Alumni.

Laksono, Fajar, Ed. 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mangesti, Yovita, Ed. 2014. *Moralitas Hukum.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Permata Aksara.

Nazar, Muhammad Afni. 2011. *Kamus Lengkap Ekonomi.* Jakarta: Citra Harta Prima.

Ngadino. 2019. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.

Sidharta, Arief. 2008. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.* Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Soemitro, Rachmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Dan Wakaf.* Bandung: Eresco.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tobing, G.H.S Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga.

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Karya Ilmiah

Hendra, Rahmad. 2012. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum, Vol. 03, No. 1.

Nugraha Agung dan Agus Mahardika. 2016. *Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Guna Mendukung E-Goverment*, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia.

Permatasari, Erina. 2017. *Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui*

Sistem Online. Semarang: Tesis Universitas Islam Sultan Agung.

Purnawati, Eva. 2006. *Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.* Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.

Rahmat, Diding. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.* Jurnal Unifikasi. Vol. 04, No. 1.

Ratnawati, Ayu. 2015. *Peranan Notaris untuk pembuatan Akta pendirian (CV) dalam mewujudkan Kepastian Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret.* Jurnal Repertorium Kenotariatan, Vol.2.

Salim, Fauzan. 2020. *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.* Jurnal Hukum. Vol. 02, No. 2.

Susetyo, Ahmad Priyo. 2005. *Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta.* Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pustaka Buana, Jakarta, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Fokus media, Bandung, 2015.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Nama Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Pengesahan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri nomor M.01-HT-01-10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

D. Internet

Saiful Bahri. Orang dan Badan Hukum dalam Hukum Islam. diakses pada http://muhamadarzachel.blogspot.co.id/2014/01/orang-dan-badan- hukum-dalam- hukum-islam.html pada tanggal 02 Juni 2020.

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam hukum/, diakses pada tanggal 04 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.